

EVALUASI PENEMPATAN PSIKOLOG DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, INDONESIA, 2011

(Evaluation the Presence of Psychologist for Mental Health Service at Primary Health Cares in Sleman District, Yogyakarta, Indonesia, 2011)

Siti Isfandari¹, Tety Rahmawati¹, Selma Siahaan¹, Betty Roosiermiatie¹,
Idawaty Abbas², Tina Afiatin³, Rusdi Maslim⁴

ABSTRACT

Background: Review of Involvement of Psychologist for Mental Health Service Provision in Primary Health Care in Sleman District, Yogyakarta, Indonesia. After its seventh year implementation, there was yet evaluation of the benefit of psychologist placement in primary health care (PHC) in Sleman district. This study means to evaluate the program. **Objective:** To explore information on the benefit of psychologist placement in PHC in Sleman district to support mental health program and whole health program. **Methods:** Focus Group Discussion with four exclusive groups, each consists of only heads of PHC, doctors and program holders were conducted to collect information on the benefit of psychologist placement in the PHC. In depth interviews to collect the information were applied to decision makers. **Result:** Psychologists bring much benefit for the PHC program. Among which are mental health service provision, consultation, support the public health program. They are competent to improve the patients and their families' behaviour for better health. Also is very useful to support the promotive, preventive and curative to encourage community for independent better health. **Conclusion:** psychologist placement in the PHC in Sleman district provides many benefits to support independent better health for the community. **Recommendation:** Psychologist placement in PHC in other place depends on their needs.

Key words: mental health service, primary health care, psychologist, Indonesia

ABSTRAK

Latar belakang: belum diketahui manfaat uji coba penempatan tenaga psikolog di Puskesmas di kabupaten Sleman. Maka dilakukan kajian terhadap uji coba pelaksanaan MOU 2004 antara pemda Sleman dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai penempatan tenaga psikologi di puskesmas kabupaten Sleman. **Tujuan:** Menggali informasi manfaat uji coba program penempatan psikolog di puskesmas dalam mendukung program kesehatan. **Metodologi:** Dilakukan Pengumpulan informasi melalui diskusi kelompok terarah dengan kelompok: kepala puskesmas, dokter, psikolog dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat dari 8 puskesmas. Wawancara mendalam dengan dinas dan institusi Pemda Sleman. **Hasil:** Psikolog berperan dalam pelayanan kesehatan jiwa, kompeten memberikan konsultasi untuk mengubah perilaku pasien, keluarga, serta melakukan fungsi public health nursing. Keberadaan psikolog mendukung upaya promotif, preventif dan kuratif dalam upaya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. **Kesimpulan:** Keberadaan psikolog di Puskesmas kabupaten Sleman sangat bermanfaat mendukung upaya promotif, preventif dan kuratif kesehatan

¹ Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jalan Percetakan Negara 23 A Jakarta 10560

² Apkesi

³ Fakultas Psikologi UGM

⁴ Smart Mind Centre

Alamat korespondensi: E-mail: lisfandari_24@yahoo.com

jiwa dan kesehatan masyarakat. **Rekomendasi:** Penempatan psikolog di Puskesmas lain disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan Pemda menyediakan tenaga psikolog.

Kata kunci: pelayanan kesehatan jiwa, puskesmas, psikolog, Indonesia

Naskah Masuk: 25 September 2012, Review 1: 27 September 2012, Review 2: 27 September 2012, Naskah layak terbit: 19 Oktober 2012

PENDAHULUAN

Berawal pada tahun 2004 disadari perlunya terobosan baru program kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi mencapai target MDG. Remaja merupakan kelompok sasaran yang dirasa penting untuk meningkatkan status kesehatan melalui penurunan IMR dan MMR. Maka dirancang program yang mempersiapkan mereka menjadi calon ibu yang memahami kesehatan reproduksi secara benar, dan diluncurkan Program Ramah Remaja. Tenaga psikolog dirasa tepat untuk menangani program tersebut, karena mereka memiliki ilmu dan keahlian yang dibutuhkan. Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

“2004: psikolog dibutuhkan, berawal dari program kespro yang memerlukan terobosan baru. Remaja merupakan generasi penerus, indikator AKI AKB, sehingga penting dimulai saat remaja = issue canten yang KIR = check up. Persentase yang hamil duluan = tinggi, apa mereka sanggup jadi calon ibu, sehingga diperlukan konsul kejiwaan.” (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2011)

Evaluasi kinerja psikolog di puskesmas dilakukan oleh Fakultas Psikologi UGM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Salah satu masukan adalah agar psikolog yang akan ditempatkan di puskesmas diberi pemahaman tentang penyakit menular. Misalnya psikolog memahami pelayanan pasien TB. Saat ini sedang disusun SOP rujukan pasien oleh psikolog ke psikiater. SOP tersebut disusun untuk menghindari keterlambatan rujukan pasien jiwa yang dapat berdampak pada kematian.

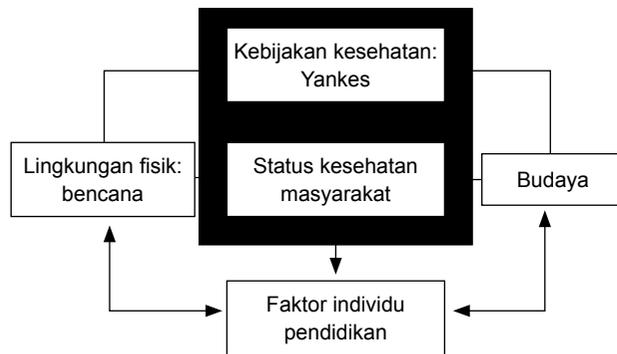
Selain membantu meningkatkan status kesehatan, penempatan psikolog di Puskesmas dilakukan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan jiwa di

masyarakat sesuai salah satu rekomendasi WHO tahun 2000, Pemerintah Daerah Sleman bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta menandatangani *Memorandum of Understanding* pada tahun 2004 tentang penempatan psikolog di Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Fakultas Psikologi UGM sebagai pelaksana. Diharapkan adanya psikolog di puskesmas dapat membantu meningkatkan status kesehatan jiwa di masyarakat, yang diharapkan dapat pula berkontribusi pada perilaku hidup sehat. Diawali dengan penempatan 6 psikolog di Puskesmas dengan satu psikolog mengampu 2 puskesmas. Dalam perkembangannya, permintaan layanan psikolog meningkat dan tidak terbatas pada layanan ke calon pengantin, sehingga dibutuhkan satu psikolog di setiap puskesmas (Sofia Retnowati, 2011).

Namun Direktur Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan memandang terdapat perbedaan filosofi antara psikolog yang dipandang tidak mendukung pemberian obat, dengan konsep medis pelayanan kesehatan. (*Dikemukakan saat dilakukan paparan proposal penelitian*). Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan bermaksud mengevaluasi program layanan psikologi oleh psikolog di puskesmas. Bagaimanakah peran psikolog terutama dengan dokter, apakah terjadi sinergisme atau bahkan antagonis.

Penelitian ini bertujuan menggali informasi dari puskesmas dengan layanan psikologi tentang keberadaan psikolog di puskesmas. Komponen yang diidentifikasi adalah peran dan pemahaman terhadap penempatan psikolog dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, pembagian peran dan mekanisme kerja sama antara dokter dan psikolog dalam melaksanakan pelayanan di puskesmas, kesesuaian terhadap layanan kesehatan jiwa yang diberikan dengan SOP. Hasil diharapkan dapat mengetahui manfaat program penempatan psikolog di puskesmas.

Kerangka Konsep



METODE

Penelitian merupakan penelitian eksploratif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan kelompok kepala Puskesmas, kelompok dokter, kelompok psikolog dan kelompok penanggung jawab program kesehatan masyarakat dari 8 puskesmas. Masing-masing kelompok terdiri dari 6–8 peserta. Topik dalam diskusi kelompok mencakup pandangan pengalaman mereka bekerja sama dengan psikolog di puskesmas, aspek negatif dan saran perbaikan. Juga dilakukan wawancara mendalam dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Sekretaris Daerah Pemda Sleman. Pertanyaan dalam wawancara mendalam mencakup asal mula program, tanggapan terhadap layanan psikolog, dan keterbatasan serta perbaikan yang diperlukan.

Data dianalisis secara deskriptif. Hasil wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah yang diperoleh melalui rekaman, kemudian ditranskripsi. Selanjutnya dibagi menurut isi/substansi dikelompokkan dalam topik kerja sama dengan sejawat dokter dan penanggung jawab kesehatan masyarakat, serta sejawat kerja lain, penanganan pasien, beban kerja, dan komunikasi dengan masyarakat.

HASIL

1. Peran psikolog dalam pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas

Dalam sistem kesehatan, pengakuan psikolog sebagai tenaga kesehatan merupakan hal baru seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SK Menpan No.Per/11/M.Pan/5/2008

tentang Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dan Angka Kreditnya. Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyiratkan walau dirasakan ada kebutuhan, namun penempatan psikolog di puskesmas belum dianggap penting dibanding dengan tenaga kesehatan lain yang sudah lebih dahulu diakui, seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi dan sanitarian. Dengan masih terbatasnya psikiater untuk diterjunkan hingga level puskesmas, Direktorat Kesehatan Jiwa Kemenkes mengharapkan psikolog dengan pendidikan setara magister strata 2 dapat berperan sejajar dengan dokter untuk melakukan diagnosis dan terapi gangguan mental emosional.

Uji coba penempatan psikolog di Puskesmas yang dimulai sejak tahun 2004 dirasakan sangat bermanfaat oleh rekan kerja mereka di puskesmas, yaitu kepala puskesmas, dokter, dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat. Terungkap di wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah yang menyatakan layanan psikolog di puskesmas sangat membantu kegiatan puskesmas di dalam gedung dan luar gedung. Awalnya penempatan psikolog bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan jiwa puskesmas di masyarakat, melakukan deteksi dini adanya masalah gangguan emosional, namun dalam kenyataannya mereka melakukan peran lebih. Para psikolog memberikan pelayanan bersama dengan dokter di poli umum untuk menangani penyakit kronis, psikosomatis. Pelayanan psikologi diberikan melalui pelayanan kesehatan reproduksi, dimulai dengan konsultasi calon pengantin (catin) agar mempersiapkan diri secara matang menjelang pernikahan. Program layanan catin merupakan salah satu upaya untuk menjangkau kalangan remaja sebagai target, terutama terkait dengan program pencegahan HIV/AIDS, dan infeksi menular seksual. Di samping pelayanan dalam gedung, psikolog juga memberikan pelayanan di luar gedung, berupa kegiatan promotif dan preventif yaitu penyuluhan kesehatan reproduksi.

Peserta diskusi kelompok menyatakan manfaat keberadaan psikolog di Puskesmas. Mereka memberi informasi bahkan program ini telah diimplementasi di kota Yogyakarta. Diskusi kelompok dengan Psikolog menyatakan selain memberi pelayanan kesehatan jiwa, mereka membantu mengintegrasikan kegiatan secara holistik, sehingga mereka merasa peran manajerial mereka lebih menonjol. Namun dalam pemaparan hasil awal kajian penelitian di Kemkes,

Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa mengungkapkan harapan agar tugas utama psikolog klinis sebagai rekan kerja dokter. Tidak hanya menangani kasus 'ringan', menerima rujukan dokter, tetapi mampu melakukan diagnosa dan terapi pasien gangguan emosional. Saat ini protokol tetap (protap) yang disepakati adalah untuk kasus-kasus tertentu dokter wajib merujuk ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Selanjutnya psikolog akan merujuk balik ke dokter.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, profesionalisme psikolog yang bersedia mendengarkan pasien, melakukan analisis membantu pasien merasa nyaman. Beliau menyatakan walaupun psikolog dirasa bermanfaat, diperlukan pembekalan lebih banyak kepada psikolog yang akan ditugaskan di puskesmas. Materi prioritas yang wajib diberikan adalah pemahaman lingkungan dan atmosfer kerja puskesmas serta penyakit menular. Disarankan agar materi pelayanan dasar Puskesmas dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Fakultas Psikologi.

“Dokter terbatas, kurang banyak mendengar. Sedangkan psikolog dididik untuk mendengar, menganalisis kasus puskesmas yang 50% tidak fisik, tapi lebih stressor. Provider medis tidak ada waktu untuk mengopeni.” (pernyataan Sekretaris Daerah saat wawancara mendalam)

Psikolog membantu penanganan kasus psikologis karena petugas puskesmas kurang memahami bidang ini, walaupun telah mendapat pelatihan dari Depkes. Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan dalam wawancara mendalam menyampaikan alasan diperlukannya psikolog dalam pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas.

“Di lain pihak, provider medis kurang pelatihan keswa, sehingga obat-obatan jiwa tidak dimanfaatkan optimal, oleh sebab itu ditkeswa mengadakan program magang di RSUD, namun tidak optimal, kurang transfer of knowledge. Perawat jiwa memantau minum obat. Tidak ada konflik antara psikolog dengan dokter. Psikolog mendengarkan keluhan, teman curhat pasien.”

2. Rangkuman tugas psikolog

Hasil FGD dan wawancara mendalam menghasilkan informasi tentang tugas psikolog dalam melakukan penanganan kesehatan jiwa di puskesmas dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara mendalam untuk mengetahui adanya masalah emosional dari keluhan fisik
- Pelacakan kasus skizofrenia.
- Pengobatan penderita skizofrenia diberikan oleh psikiater atau sesudah dirujuk ke RS, antara lain RS Grasia, RS Sardjito.
- Kasus psikosis dikonsultasikan ke psikolog bila penderita sudah agak tenang.
- Pelayanan psikolog untuk kasus psikosis untuk keluarga pasien, berupa edukasi tentang obat-obatan agar tak disalahgunakan,
- Pemantauan minum obat dengan menghitung jumlah obat,
- Pendampingan agar minum obat teratur.
- Anamnesa menggali keluhan pasien
- Pelayanan depresi, skizofrenia, kenakalan remaja, kehamilan remaja/kehamilan yang tidak dikehendaki, narkoba.
- Rujukan selektif pasien penyakit kronis

Kompetensi

- Menguasai teknik perubahan perilaku masyarakat mandiri hidup sehat.
- Motivator dilakukannya kebiasaan hidup sehat.
- Mampu berfungsi dalam *public health nursing*, upaya promotif dan preventif, selain upaya kuratif yang selama ini menjadi prioritasnya.

Hambatan

- Pasien tidak bersedia dirujuk dengan alasan,
 - o tidak ada waktu
 - o merasa bukan/tidak sakit kejiwaan.
- Psikolog hanya mampu memberikan pelayanan sekitar 5 pasien sehari.

3. Posisi psikolog dalam ketenagaan kesehatan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan pentingnya tenaga psikolog untuk menunjang program pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misinya telah dirasakan Pemerintah Daerah Kabupaten. Namun keterbatasan anggaran berujung pada keterbatasan formasi. Dalam sistem Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kerja sama Pemda Sleman dengan UGM termasuk sebagai upaya pendayagunaan tenaga tanpa pengangkatan honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. PP ini melarang pengangkatan honorer setelah tahun 2005. Psikolog klinis dapat diangkat menjadi

PNS dengan mengikuti peraturan penerimaan PNS setiap tahunnya jika tersedia formasi yang cukup.

Karena jumlah formasi PNS sangat sedikit maka formasi penerimaan psikolog sangat terbatas. Tidak dapat memenuhi kebutuhan. Formasi yang tersedia diperebutkan secara terbuka, transparan bagi seluruh masyarakat. Tidak ada dispensasi bagi tenaga yang tergabung dalam MOU. Mereka harus bersaing untuk mendapatkan kursi PNS tersebut. Untuk tahun 2011 Pemkab Sleman tidak mendapat formasi dari pusat karena kuota penggunaan APBD 60% untuk belanja pegawai sudah digunakan. Oleh karenanya program kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut sampai ada kebijakan lainnya.

Poin penting lain adalah tenaga psikolog ini belum dapat ditetapkan menjadi tenaga fungsional karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI yang mengatur tentang Besaran Tunjangan Jabatan Fungsionalnya walaupun SK Menpan yang mengatur tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya telah terbit.

PEMBAHASAN

Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa merupakan salah satu tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014 (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Hal ini sejalan dengan temuan studi global kesehatan jiwa yang mendapatkan masih rendahnya cakupan pasien jiwa di fasilitas kesehatan (Desjarlais, R, Eisenberg L, Good B, Kleinman, 1995, WHO 2000). Salah satu penyebab diduga rendahnya aksesibilitas ke pelayanan kesehatan jiwa, yang sebagian besar masih terpusat di rumah sakit. Sehingga WHO merekomendasi pengintegrasian pelayanan kesehatan jiwa dalam pelayanan di Puskesmas. (Sofia Retnowati, 2011).

Mengakomodasi upaya mendekatkan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat dan program prioritas Kemenkes terkait MDGs, pelayanan psikolog masuk melalui upaya kesehatan reproduksi (Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2007; Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 2006). Program awal konsultasi pada calon penganten (caten), mempersiapkan pasangan yang akan menikah menjaga kesehatan diri dan bayinya. Dalam perkembangannya, masyarakat, puskesmas dan dinas kesehatan merasakan manfaat keberadaan psikolog, sehingga program ini diadopsi oleh kota DIY.

Karena keterbatasan kuota formasi PNS di Kabupaten Sleman, formasi psikolog juga sangat kecil, belum dapat memenuhi kebutuhan. Maka upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan jiwa ke masyarakat melalui pemanfaatan psikolog harus mencari skema inovatif, tidak hanya terpaku pada sistem penerimaan pegawai. Organisasi profesi Himpunan Psikologi sudah berhasil memasukkan profesi psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan fungsional, sehingga diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya berikut adalah melakukan advokasi berjenjang secara nasional hingga level kabupaten tentang manfaat penempatan psikolog. Dilanjutkan dengan upaya legalitas secara hukum berupa tersusun Peraturan Pemerintah RI yang mengatur besaran tunjangan jabatan fungsional.

Karena program kesehatan jiwa bukan merupakan program utama, maka penempatan psikolog di Puskesmas belum menjadi prioritas di Puskesmas. Pengalaman di RS Riyadh, Saudi Arabia dengan keterbatasan psikiater maka dibentuk team work untuk pelayanan kesehatan jiwa yang terdiri dari psikiater, perawat, psikolog dan tenaga promosi kesehatan (diskusi peneliti dengan rekan sejawat di Arab Saudi 2012).

Hasil evaluasi penempatan psikolog klinis di puskesmas menunjukkan mereka sangat bermanfaat, baik sebagai profesional kesehatan jiwa maupun sebagai koordinator untuk mengintegrasikan kegiatan puskesmas di luar gedung. Serta melakukan fungsi *public health nursing*, motivator promotor hidup sehat. Dr Pandu, pejabat Direktur Kesehatan Jiwa tahun 2000, pada saat pemaparan hasil penelitian menyatakan diperlukan kehati-hatian untuk menyatakan psikolog dapat melakukan fungsi *public health nursing*, karena adanya spesifikasi peran tersebut. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan topik *public health nursing* dalam kurikulum program psikolog klinis.

Penelitian ini selain mendukung program Kementerian Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa hingga level puskesmas (tribunnews.com/2012), juga memperkaya penelitian kesehatan jiwa masyarakat di Indonesia. Menggunakan kata kunci *mental health indonesia*, hanya terdapat 132 publikasi ilmiah internasional kesehatan jiwa yang menyebutkan Indonesia di *PubMed*. Sebagian besar membahas kesehatan jiwa terkait Tsunami, dan

daerah konflik. Materi publikasi pelayanan kesehatan jiwa masyarakat lebih mudah diperoleh melalui media massa dan situs Kementerian Kesehatan.

Dari hasil Riskesdas 2007, kesehatan jiwa merupakan salah satu indikator kuat dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Kemkes, 2010). Sehingga diperlukan lebih banyak penelitian tentang kesehatan jiwa di masyarakat untuk memperkuat data kesehatan jiwa sebagai salah satu indikator kesehatan, sehingga menjadi program prioritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya psikolog di puskesmas kabupaten Sleman sangat membantu puskesmas. Selain melaksanakan tugas utama memberikan pelayanan kesehatan jiwa, psikolog juga melakukan promosi hidup sehat dan mencegah penyakit melalui tindakan preventif. Hal ini sangat membantu pencapaian tujuan besar Kemkes agar masyarakat dapat hidup sehat mandiri.

Saran

Agar psikolog dapat memenuhi kriteria sebagai partner dokter di Puskesmas, perlu peningkatan kemampuan melakukan diagnosis dengan menambah kurikulum kesehatan jiwa. Karena penempatan psikolog di Puskesmas ditentukan berdasar kebijakan daerah, maka pemerintah daerah menyediakan

alokasi formasi bagi psikolog agar dapat ditempatkan di Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Desjarlais. R, Eisenberg L, Good B, Kleinman A, World Mental Health: problems & priorities in low income countries, 1995, Oxford University Press.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 2006. Pengembangan Puskesmas Ramah Remaja; Konsep dan Implementasi di Kabupaten Sleman.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. 2007. Pedoman Penilaian Puskesmas Ramah Remaja Kabupaten Sleman.
- <http://www.tribunnews.com/2012/10/14/menkes-desak-puskesmas-bisa-layani-pasien-jiwa-ringan>.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. 2010. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI, 2010, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014.
- Puskesmas Integrasikan Layanan Kesehatan Jiwa, Cakrawala Rabu, 14 Oct 2009 16: 27: 30, <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=5222&tbl=cakrawala>.
- Sinar Harapan, Senin, 11 Oktober 2010 13:38 Hari Kesehatan Jiwa: Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa Masih Minim Availabe at <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/akses-pelayanan-kesehatan-jiwa-masih-minim> accessed July 18th 2011.
- Sofia Retnowati. Psikolog Puskesmas: Kebutuhan dan tantangan bagi profesi psikolog klinis Indonesia. Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2011.